MOHAMMAD HATTA

PERSOALAN EKONOMI SOSIALIS INDONESIA

PENERBIT DJAMBATAN

PERSOALAN EKONOMI SOSIALIS INDONESIA

Kepala uraian ini menimbulkan masalah dalam masalah. Sebab, sebelum mengupas masalah ekonomi sosialis Indonesia, perlu didjawab lebih dahulu pertanjaan : apa jang dikatakan sosialisme ? Dan apa pula sosialisme Indonesia ?

Ada berbagai pendapat tentang sosialisme. Begitu pula, dengan sendirinja, tentang sosialisme Indonesia. Orang terdorong kepada sosialisme karena beberapa alasan. Karena etik agama, jang menghendaki adanja rasa persaudaraan dan tolong-menolong antara sesama manusia dalam pergaulan hidup. Melaksanakan bajangan Keradjaan Allah diatas dunia adalah tudjuannja. Kemudian, perasaan keadilan jang menggerakkan djiwa berontak terhadap kesengsaraan hidup dalam masjarakat, terhadap keadaan jang tidak sama dan perbedaan jang mentjolok mata antara kaja dan miskin, menimbulkan dalam kalbu manusia berbagai konsepsi tentang sosialisme. Orang kenal akan konsepsi de Saint-Simon, Charles Fourier dan Robert Owen. Semuanja mentjiptakan suatu dunia baru, dimana tiap-tiap orang hidup bahagia. Disebelah itu didapati pula rentjana jang lebih realis, seperti sosialisme kooperatif tjita-tjita Louis Blanc dan sosialisme gilda jang dikemukakan oleh Fabian

Society di Inggeris. Lebih kesohor dari semuanja itu paham sosialisme Karl Marx, jang terkenal sebagai sosialisme ilmiah.

Marx mengetjam konsepsi-konsepsi sosialisme seperti jang ditjiptakan oleh Fourier dan Owen sebagai angan-angan belaka, karena mereka tidak menundjukkan djalan bagaimana mentjapainja. Semuanja itu utopia, katanja, impian semata-mata. Marx sendiri selalu menolak memberi gambaran tentang sosialisme, sebab sosialisme ilmiah tidak dapat „membuat resep bagi dapur umum dimasa datang". Sosialisme jang akan datang menggantikan kapitalisme adalah buah dari pada perkembangan masjarakat dalam sedjarah dibawah pengaruh hukum dialektik. Dengan djalan ilmiah tidak dapat ditentukan sekarang bentuk dan rupa masa datang. Susunan baru dari pada masjarakat tidak dibuat melainkan dilahirkan.[1]

Sosialisme, kata Marx, bukanlah pendapat seorang pudjangga jang mau membarui dunia, tetapi suatu kedjadian jang tidak dapat dielakkan, sebagai akibat dari pada pertentangan dua kelas jang dilahirkan sedjarah, jaitu kelas burdjuis dan kelas proletariat.

1. Tentang pendapat ini diberikan ilustrasinja oleh *Marx* didalam bukunja „Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte", dimana ia menggambarkan sedjelas-djelasnja kegagalan revolusi di Perantjis pada pertengahan abad jang lalu, karena sjarat-sjarat untuk lahirnja belum ada dalam masjarakat. Karena meletus sebelum waktunja, ia menimbulkan jang sebaliknja, reaksi.
   Lihat djuga berhubung dengan ini *Karl Marx*. „Die Klassenkämpfe in Frankreich 1848 bis 1850", Neuauflage Dietz Verlag Berlin, 1951.

Dan tudjuan dari pada sosialisme bukanlah membuat suatu konstruksi masjarakat dalam suatu sistim jang selesai bentuknja, melainkan menjelidiki suatu perkembangan sedjarah jang menimbulkan dua kelas jang bertentangan, dan kemudian mempeladjari betapa timbulnja dari pangkuan ekonomi masjarakat faktor-faktor jang akan melenjapkan pertentangan itu.[2]

Engels menegaskan pendapat Marx itu dalam bukunja jang berkepala „Perkembangan sosialisme dari Utopia sampai ke Ilmu".[3] Lama sebelum itu ia mengatakan, dalam suatu risalah propaganda jang tersusun berupa tanja-djawab tentang berbagai hal, bahwa komunisme adalah *adjaran* tentang sjarat-sjarat jang mesti dipenuhi untuk mentjapai kemerdekaan kaum buruh.[4]

Dari beberapa kutipan ini njatalah, bahwa tudjuan Marx ialah mengupas perkembangan masjarakat sebagai dasar ilmiah bagi pergerakan kaum buruh

2. Pendapat Marx ini djelas sekali diuraikannja, pertama kali dalam bukunja „Das Elend der Philosophie", jang menentang pendapat *Proudhon* dalam bukunja „La philosophie de la misère". Kemudian bersama-sama dengan *Engels* dalam „Manifest der kommunistischen Partei", Februari 1848.
   Tentang Marx dan adjarannja dalam garis besarnja, lihat buku saja „Pengantar kedjalan Ekonomi Sosiologi", Djakarta 1957.
3. *Friedrich Engels* „Die Entwicklung des Sosialismus von der Utopie zur Wissenschaft", mit einem Anhang *Karl Radek*, „Der Entwicklung des Sosialismus von der Wissenschaft zur Tat", 3. durchgesehene Auflage, Berlin, 1930.
4. *Marx-Engels*, „Kleine ökonomische Schriften", Dietz Verlag Berlin 1955, hal. 201.

untuk merubuhkan kapitalisme. Ia berpikir tjara dialektik, jang dipeladjarinja dari Hegel, tetapi dengan membalikkan hubungan kausalnja. Apabila Hegel mengatakan bahwa segala perkembangan kedjadian didunia dipengaruhi dan ditentukan oleh idea, tjipta manusia, Marx mengatakan bahwa „bukan keinsafan manusia jang menentukan keadaan sosialnja, melainkan sebaliknja, keadaan sosialnja jang menentukan keinsafannja. Berdasarkan dialektik itu dikarangnja suatu metode ilmiah, rangka berfikir, jang serta djuga mendjadi kejakinan hidup bagi dia dan pengikut-pengikutnja, jang terkenal dengan nama historis-materialisme.

Inti sari dari pada historis-materialisme ialah, bahwa tjara manusia menghasilkan keperluan hidupnja menentukan djalannja penghidupan sosial dan politik dan djalannja pikiran.[5] Perhubungan sosial rapat sekali hubungannja dengan tenaga-tenaga produksi. Kalau manusia mendapatkan tenaga-tenaga produksi baru, ia mengubah tjaranja menghasilkan, dan dengan perubahan tjara menghasilkan, tjara orang memperoleh sjarat hidupnja, diubahnja segala perhubungan hidup dalam masjarakat. Kintjir tangan melahirkan masjarakat dengan tuan-tuan tanah, mesin uap menimbulkan masjarakat dengan kapitalis industri.[6]

5. Terdjemahan dari pada Historis-Materialisme seluruhnja lihat didalam buku saja „Pengantar kedjalan Ekonomi Sosiologi", hal. 148 d.s.

6. *Karl Marx,* „Das Elend der Philosophie", Dietz Verlag Berlin 1952, hal. 130.

Berdasarkan teori itu jang bertjampur „Weltanschauung" Marx mengarang bersama-sama dengan Engels „Manifes Komunis" sebagai pegangan bagi kaum buruh dalam perdjuangannja untuk mempertjepat rubuhnja kapitalisme. Pokok pikiran dalam manifes itu adalah begini. Produksi ekonomi dan struktur masjarakat setiap masa jang dilahirkannja mendjadi dasar sedjarah politik dan sedjarah penghidupan rohani dari pada masa itu. Karena itu sedjarah tiap-tiap masjarakat sedjak lenjapnja milik bersama atas tanah sampai sekarang adalah sedjarah perdjuangan kelas. Perdjuangan itu jang bentuknja berlain-lain dari masa ke masa adalah perdjuangan antara kelas jang dihisap dan kelas jang menghisap, antara kelas jang tertindas dan kelas jang menindas. Perdjuangan itu sekarang sudah sampai pada satu saat, bahwa kelas jang dihisap dan tertindas, jaitu proletariat, tidak dapat lagi membebaskan dirinja dari genggaman kelas jang menghisap dan menindas dengan tiada sekaligus memerdekakan seluruh masjarakat untuk selama-lamanja dari penghisapan, penindasan dan perdjuangan kelas.[7]

Sjarat jang pokok bagi kekuasaan kelas burdjuis ialah penumpukan harta ditangan orang-orang partikulir, pembentukan kapital dan memperbesar djumlahnja senantiasa. Djaminan bagi adanja kapital itu ialah upah bekerdja. Upah bekerdja berdasar semata-mata atas persaingan antara kaum buruh.

7. Lihat *Friedrich Engels,* dalam kata pengantar pada Manifest der kommunistischen Partei", tjetakan kedua tahun 1883.

Kemadjuan industri jang kaum burdjuis mendjadi pendukungnja dengan tidak semaunja tetapi tidak pula ditentangnja, mengubah isolasi kaum buruh jang disebabkan oleh persaingan antara mereka dengan adanja perkumpulan revolusioner kaum buruh dengan djalan bersekutu. Dengan perkembangan industri rubuhlah dasar tempat kaum burdjuis berpidjak untuk menghasilkan dan memiliki hasilnja. Mereka menghasilkan penguburnja sendiri. Hantjurnja kaum burdjuis dan kemenangan kaum proletar sama-sama tidak dapat dielakkan. Dan berhubungan dengan itu, tudjuan jang terdekat dari pada partai-partai buruh ialah menjatukan proletariat mendjadi satu kelas, mendjatuhkan kekuasaan kaum burdjuis, merebut kekuasaan politik oleh kaum proletariat.

Begitulah ! Teori Marx bersifat ilmiah, karena ia mengemukakan diatas sjarat-sjarat apa masjarakat berkembang dengan melalui feodalisme dan kapitalisme kedjurusan sosialisme, sebagai mata terachir dari rangkaian tesa-antitesa-sintesa. Kalau sjarat-sjarat itu tidak dipenuhi karena berbagai tenaga jang bertentangan dalam masjarakat, mungkin perkembangan itu tidak seperti jang dikupas oleh Marx. Soalnja sekarang bagi siapa jang menghendaki sosialisme, ialah mengusahakan supaja sjarat-sjarat jang tertentu itu terlaksana. Apabila sjarat-sjaratnja terlaksana, maka dengan sendirinja masjarakat berkembang menurut hukumnja ke sosialisme. Salah satu dari sjarat jang terpenting ialah perdjuangan kelas jang dilakukan dengan keinsafan jang makin

besar oleh kaum proletariat. Sebab itu Marx dalam program politiknja menegaskan kepentingan perdjuangan kelas itu sebagai latihan bagi kaum proletariat untuk memenuhi tugas sedjarahnja, apabila sudah datang saatnja.

Bagi Marx tidak ada jang terdjadi sekonjong-konjong dengan tiada melalui proses jang tertentu. Betapa djuga revolusioner teorinja, revolusi sosial jang melaksanakan peralihan dari masa jang satu kemasa jang lain tidak terdjadi sebelum matang saatnja. Suatu bangunan pergaulan hidup tidak akan rubuh — demikian dirumuskannja didalam Historis-Materialisme — sebelumnja segala tenaga produksi didalamnja mentjapai puntjak kemadjuannja. Dan perhubungan produksi baru, jang lebih tinggi tingkatnja, belum akan mengambil tempatnja, sebelum sjarat-sjarat hidupnja dilahirkan dalam pangkuan hidup jang lama". Dengan perkataan lain, kapitalisme tidak akan rubuh sebelum berkembang sepenuhnja, dan sosialisme tidak akan timbul, sebelum pemangku-pemangkunja lahir, berkembang dan besar dalam perdjuangan didalam kapitalisme. [8]

Djadinja bagi Marx, sjarat jang terutama untuk mentjapai sosialisme tidaklah membuat berbagai konstruksi jang ideal bagi masa datang, melainkan memahamkan sedjarah sosial jang berkembang

8. Lihat djuga *Friedrich Engels*, „Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft" — ringkasnja Anti-Dühring —, 5. Auflage, Dietz Verlag Berlin 1952, hal. 348.
Pada edisi Inggerisnja, penerbitan Foreign Languages Publishing House, Moscow 1954, pada hal. 389 d.s.

dengan bertingkat-tingkat dibawah pengaruh hukum dialektik. Hanja dengan mempunjai pengertian itu orang dapat memberi dorongan jang tepat pada aliran perkembangan itu. Dalam „Das Elend der Philosophie" Marx menuliskan kata kritik seperti berikut : [9]

„Sebagaimana ahli-ahli ekonomi djurubitjara ilmiah dari pada kelas berdjuis, begitu pula kaum sosialis dan komunis adalah ahli teori dari pada kelas proletar. Selama proletariat belum tjukup kemadjuannja untuk mendudukkan dirinja sebagai kelas, dan karena itu perdjuangan proletariat dengan burdjuis belum mempunjai sifat politik, selama tenaga-tenaga produksi sendiri dalam pangkuan burdjuis belum tjukup kemadjuannja untuk dapat melihat sjarat-sjarat materiil jang diperlukan sekali untuk membebaskan kaum proletariat dan untuk membangun masjarakat baru, selama itu ahli-ahli teori itu hanja orang-orang utopia belaka jang untuk memperbaiki nasib kelas-kelas jang tertindas, memikirkan berbagai sistim dan mentjari suatu ilmu jang menghidupkan. Tetapi sedjalan dengan kemadjuan sedjarah dan dengan itu perdjuangan kaum proletariat makin djelas tampak tjoraknja, mereka tak perlu lagi mentjari ilmu dalam kepalanja. Mereka hanja perlu memperhatikan apa jang tampak terdjadi dimukanja dan mempergunakan dirinja sebagai anggota dari pada itu. Selama mereka mentjari-tjari ilmu dan hanja membuat berbagai sistim, selama mereka berada pada permulaan

9. Lihat disana halaman 146.

perdjuangan, mereka hanja melihat sengsara dalam sengsara, dengan tiada melihat didalamnja segi revolusioner jang mau merubuhkan, jang akan meruntuhkan masjarakat jang tua sama sekali. Dari mulai saat ini ilmu mendjadi hasil jang njata dari pada gerakan historika, dan ia tidak lagi ilmu jang doktriner. Ilmu itu mendjadi revolusioner".

Sesuai dengan filsafat sosialnja Marx memandang konstruksi-konstruksi utopia itu sebagai tjermin dari pada pergolakan ekonomi dan sosial dalam masjarakat pada suatu tingkat dalam perkembangannja. Marx berpendapat — dalam Historis-Materialisme —, bahwa perhubungan produksi burdjuis adalah bentuk pertentangan jang terachir dari pada proses penghasilan masjarakat. Tenaga produksi jang lahir dan besar dalam pangkuan masjarakat kapitalis itu menimbulkan beserta itu sjarat-sjarat jang njata untuk menjelesaikan pertentangan itu. Dengan berachirnja pertentangan kelas jang penghabisan itu timbullah — setelah menempuh masa peralihan dengan diktatur proletariat — masjarakat sosialisme, dimana tidak ada lagi kelas jang menindas dan tertindas, tidak ada pertentangan kepentingan. Oleh karena dalam sosialisme alat-alat penghasil mendjadi kepunjaan masjarakat, maka produksi didjalankan oleh orang banjak untuk orang banjak, dibawah pimpinan badan-badan masjarakat jang bertanggung djawab kepadanja. Sebagai ganti anarki produksi jang berlaku dalam kapitalisme, dapatlah dilaksanakan — kata Engels [10] — suatu rentjana produksi masjarakat

10. *Friedrich Engels*, „Anti-Dühring", hal. 346.

jang teratur menurut keperluan rakjat keseluruhannja dan keperluan tiap-tiap orang.

Berdasarkan teori dan kejakinannja, bahwa sosialisme akan lahir dari pangkuan kapitalisme sebagaimana kapitalisme lahir dari pangkuan feodalisme, Marx mempergunakan sebagian besar dari pada waktunja untuk mempeladjari dan menganalisa sifat-sifat dan perkembangan kapitalisme sedalam-dalamnja. Dari usaha itu lahirlah buah tangannja jang terpenting „Das Kapital", suatu kerdja jang monumental. Bahan-bahan ilmiah jang dipergunakannja sudah usang, pandangan jang dikemukakannja sudah ketinggalan zaman, prognose jang dibuatnja tidak sesuai dengan perkembangan jang njata, — tetapi semuanja itu tidak mengurangkan nilai dan hebat pikirannja. Djuga terhadap karya Marx berlaku utjapannja sendiri, bahwa tiap-tiap jang dilahirkan itu adalah „historische, *vergänglich, vorübergehende Produkte*". [11]

Ditilik benar-benar, Marx adalah nabi dari sosialisme, tetapi studen dari pada kapitalisme. [12] Sebab itu tidak mengherankan, apabila gerakan sosialisme sepeninggalnja terpengaruh oleh tiga matjam aliran.

11. *Karl Marx*, „Das Elend der Philosophie", hal. 130.
12. Pengikut-pengikutnja jang terbesar, selain dari memperdalam pendapat tentang historis-materialisme, mengikuti djedjaknja : mengupas masalah-masalah kapitalisme. Ada pula kemudian jang membulatkan adjarannja mendjadi suatu sosiologi marxisme.
Misalnja *Heinrich Cunow*, „Die Marxsche Geschichts-, Gesellschafts- und Staatstheorie. Grundzüge der Marxschen Soziologie", 2 Bde, Berlin 1923. Teori-teori tentang sosialisme sendiri sedikit sekali.

Ada aliran jang mau membarui pandangan teori dan politiknja, disesuaikan dengan kenjataan. Aliran ini disebut revisionisme dan reformisme, jang diandjurkan oleh *Bernstein*. Revisionisme, karena mengadakan perubahan pada teori. Reformisme, karena mau menempuh djalan ke sosialisme dengan mengadakan reform, perubahan berangsur-angsur pada kapitalisme dengan mengutamakan perdjuangan didalam parlemen. Mereka pertjaja, dengan pelaksanaan demokrasi kaum buruh lambat-laun akan mentjapai suara jang terbesar dalam parlemen. Ada aliran jang berpegangan teguh kepada adjaran Marx, aliran dogmatik, jang mula-mula dipimpin oleh *Karl Kautsky*. Ada pula aliran, jang dalam teori tetap berpegang kepada Marx, tetapi dalam politik menempuh djalan jang revolusioner. Aliran ini dipimpin oleh *Lenin*. Adjarannja terkenal kemudian sebagai leninisme. Menurut Lenin, untuk melaksanakan peralihan dari kapitalisme ke sosialisme, orang tak perlu menunggu sampai kapitalisme matang, tetapi setiap ada kesempatan bagi kaum buruh untuk merebut kekuasaan, kesempatan itu dipergunakan sepenuh-penuhnja. Aliran jang pertama dan kedua tetap didalam gerakan partai sosial-demokrasi, sebagai sajap kanan dan sajap kiri, sedangkan Lenin memisahkan diri, mendirikan organisasi sendiri jang kemudian mendjadi partai komunis. Bagi Lenin, untuk mentjapai tudjuan tidak perlu adanja partai massa. Aksinja didasarkan kepada anggota inti jang sedikit djumlahnja, tetapi

bertekad keras dan berdisiplin wadja. Untuk memelihara hubungan jang erat dengan marxisme, *Stalin* memberikan definisi kepada leninisme sebagai „marxisme pada masa imperialisme dan revolusi proletar". Lebih tepat — katanja — leninisme adalah teori dan taktik revolusi besar umumnja, teori dan taktik diktatur proletariat chususnja.[13]

Kemudian, ada lagi gerakan sosialisme jang lepas sama sekali dari adjaran Marx. Sosialisme tidak dipahamkan sebagai susunan masjarakat baru jang datang dengan sendirinja, sebagai pembawaan perkembangan masjarakat atas dorongan hukum dialektik, melainkan dikehendaki sebagai tuntutan hati. Sosialisme dipandang sebagai suatu pergaulan hidup jang mendjamin kemakmuran bagi segala orang, kemakmuran jang bertambah besar senantiasa.

Tetapi, bagaimana djuga berbeda pendapat tentang sosialisme dan tjara mentjapainja, dalam satu hal ada persamaan. Semua *sosialisme* menghendaki *suatu pergaulan hidup, dimana tak ada lagi penindasan dan penghisapan dan didjamin bagi rakjat, bagi tiap-tiap orang, kemakmuran dan kepastian penghidupan serta perkembangan keperibadiannja.* Tidak sadja kaum utopia, tetapi djuga Marx mengatakan, bahwa dengan sosialisme lahirlah pergaulan hidup manusia, dimana kebebasan tiap-tiap orang untuk mentjapai

13. *J. Stalin,* „Fragen des Leninismus", Dietz Verlag Berlin, 1952, hal. 10. Salinan kedalam bahasa Inggeris „The Foundation of Leninism" dimuat dalam kumpulan karangannja : *J.V. Stalin,* „Works", vol. 6, Moskow 1953.

kemadjuan mendjadi sjarat bagi kemadjuan segala orang dengan bebas.

Sekarang, bagaimana duduknja sosialisme Indonesia? Tjita-tjita sosialisme lahir dalam pangkuan pergerakan kebangsaan Indonesia. Dalam pergerakan jang menudju kebebasan dari penghinaan diri dan pendjadjahan, dengan sendirinja orang terpikat oleh tuntutan sosial dan humanisme — peri-kemanusiaan — jang disebarkan oleh pergerakan sosialisme dibenua Barat. Dari adjaran Marx, jang dibawa kemari oleh orang-orang sosialis Belanda dan buku-buku propaganda sosial-demokrasi, orang ketahui hanja soal akumulasi dan konsentrasi kapital dalam kapitalisme dan expansinja ketanah djadjahan dengan tindakan menghisap dan menindas kaum buruh. Sistim teorinja dengan dasar filsafah sosialnja seluruhnja tidak begitu dipeladjari, mungkin djuga tidak terpahamkan pada masa permulaan itu.

Tuntutan sosial dan humanisme itu tertangkap pula oleh djiwa Islam, jang memang menghendaki pelaksanaan dalam dunia jang tidak sempurna perintah Allah Jang Pengasih dan Penjajang serta Adil, supaja manusia hidup dalam sajang-menjajangi dan dalam suasana persaudaraan dengan tolong-menolong.[14] Djiwa Islam berontak terhadap kapitalisme jang menghisap dan menindas jang menurunkan deradjat manusia, jang membawa sistim jang lebih djahat dari pada perbudakan, dari pada feodalisme. Dunia ini

14. Lihat seterusnja tentang ini karangan saja „Islam dan Sosialisme" dalam Pandji Masjarakat no. 20, nomor Idul-fitri, tanggal 28 Maret 1960.

adalah kepunjaan Allah semata-mata jang disediakan untuk tempat kediaman manusia sementara, dalam perdjalanannja menudju dunia jang baka. Kewadjiban manusia tidaklah memiliki dunia, kepunjaan Allah, melainkan memeliharanja sebaik-baiknja dan meninggalkannja kepada angkatan kemudian dalam keadaan jang lebih baik dari jang diterimanja dari angkatan jang terdahulu. Bukankah serupa pula dengan ini pendapat jang dikemukakan oleh Karl Marx dalam „Das Kapital"? „Dari pendirian pergaulan hidup ekonomi jang lebih tinggi — katanja — milik perseorangan diatas dunia ini tidak enak sama sekali rupanja, seperti milik prive orang-seorang atas orang lain. Seluruh masjarakat sekalipun, satu bangsa, ja segala masjarakat jang ada itu kesemuanja, bukanlah pemilik dari pada dunia ini. Mereka hanja penduduknja, pemakainja, dan mereka serupa dengan boni patres familias — kepala keluarga jang baik — harus meninggalkannja kepada generasi jang akan datang berturut-turut dalam keadaan jang lebih baik". [15]

Maka berdjumpalah tjita-tjita sosial-demokrasi Barat dengan sosialisme Islam diatas bumi Indonesia.

Marxisme dalam arti komunisme masuk ke Indonesia sebagai akibat dari pada Revolusi Oktober di Rusia pada tahun 1917. Tindakan dan tudjuan politik Lenin [16] dapat ditangkap sekaligus, tetapi dasar filsafah sosialnja [17] tidak terpahamkan oleh pemimpin-pemimpin „jang tidak bersekolah" pada waktu itu. Itupun tidak pula perlu, tudjuannja tjukup terang : membebaskan manusia dari tindasan kapitalisme. Marxisme, jang berdasarkan pandangan hidup materialisme, jang meniadakan adanja ideologi jang berdiri sendiri, hanja dianut oleh P.K.I., itupun tidak pula dalam segala konsekwensinja. Berbagai anggotanja masih belum dapat memahamkan sepenuhnja pertentangan jang tidak dapat dikompromiskan antara materialisme dan idealisme. [18] Mungkin ini pembawaan alam Indonesia, jang belum lama mengenal masalah-masalah jang dikupas sedalam-dalamnja oleh Marx dan Lenin serta pengikut-pengikut mereka dan mereka jang kritis.

Kemudian, pemimpin-pemimpin Indonesia jang tidak dapat menerima marxisme sebagai pandangan hidup jang berdasarkan materialisme, mentjari sumber-sumber sosialisme dalam masjarakat sendiri. Bagi mereka sosialisme adalah suatu tuntutan djiwa, kemauan hendak mendirikan suatu masjarakat jang adil dan makmur, bebas dari segala tindasan. Pokok teori Marx jang tertanam didalam historis-materialisme diakui sebagai teori ilmiah jang terpakai untuk mempeladjari perkembangan masjarakat atas penga-

15. „Das Kapital III", bagian II, hal. 309.
16. Lihat *V.I. Lenin,* „Imperialism, The highest Stage of Capitalism", Petrograd 1917, didalam „Selected Works" Vol. I bagian 2.

17. Ditegaskan didalam *V.I. Lenin,* „Materialismus und Emperiokritizismus", dimana tadjam sekali ia menentang segala jang bertjorak idealisme. Lihat hal. 331 d.s.
18. Lihat pidato saja pada Universitas Sun Yat Sen di Kanton pada bulan Oktober 1957 tentang „Sosialisme di Indonesia" dalam Kumpulan Pidato di R.R.T., diterbitkan oleh Kedutaan Besar R.I. di Peking, kemudian diperbanjak kembali oleh S.S.K.A.D., Bandung, sebagai bahan peladjaran.

ruh fakta-fakta ekonomi. Tetapi, seperti djuga dengan tiap-tiap teori, kebenarannja hanja berlaku diatas sjarat-sjarat jang diumpamakan untuk bekerdjanja. Tidak semua sjarat-sjarat jang diumpamakan didalam historis-materialisme dan manifes komunis terdapat di Indonesia. Dibawah kekuasaan kapitalisme kolonial tidak akan mungkin terdjadi perkembangan jang bebas menurut hukumnja dari masjarakat agraria ke masjarakat industri sampai kepada puntjaknja jang memungkinkan berubahnja kapitalisme mendjadi sosialisme. Tenaga-tenaga jang menentang, jang tidak diperhitungkan dalam teori Marx, sangat banjak dan sangat kuat. Perdjuangan kelas, jang diandjurkan sebagai didikan dan latihan kaum buruh untuk menghadapi tugas sedjarahnja dirintangi oleh kekuasaan kolonial. Apakah orang harus menunggu sampai achir zaman untuk memperoleh sosialisme di Indonesia jang muntjul menurut teori Marx ?

Sosialisme dipahamkan sebagai *tuntutan institusionil,* jang bersumber dalam lubuk hati jang murni, berdasarkan perikemanusiaan dan keadilan sosial. Agama menambah penerangannja. Tetapi bagaimana mendudukkannja dan apa dasar sosialnja, supaja keinginan hati itu djangan mendjadi utopia belaka? Maka ditjarilah dasar-dasarnja itu kedalam masjarakat sendiri. Sebab, kalau sosialisme mau kuat di Indonesia, mestilah ada akarnja dalam pergaulan hidup Indonesia. Dasar-dasar bagi sosialisme Indonesia terdapat pada masjarakat *desa jang asli,* jang bertjorak *kolektif,* jang banjak sedikitnja masih bertahan sampai sekarang.

Didalam masjarakat desa jang asli di Indonesia tanah bukanlah milik orang-seorang, melainkan kepunjaan desa. Orang-seorang hanja mempunjai hak pakai. Orang-seorang dapat mempergunakan tanah jang masih kosong sebanjak jang dapat dikerdjakannja untuk keperluan hidupnja sekeluarga. Hanja mendjual ia tak boleh. Pada umumnja tanah itu dapat dipakainja selama-lamanja, turun-menurun sampai kepada anak-tjutjunja, seolah-olah tanah itu sudah mendjadi hak miliknja. Tetapi tanah itu bukan hak miliknja. Sebab, apabila ia berhenti mengerdjakannja, tanah itu kembali kepada desa dan desa dapat menjerahkannja lagi kepada orang lain jang ingin mengerdjakannja. Pada saat itu kelihatanlah keadaan jang sebenarnja, jang tak tampak sepintas lalu, bahwa tanah adalah *kepunjaan masjarakat,* bukan kepunjaan orang-seorang. Pada berbagai daerah dipulau Djawa masih berlaku sampai sekarang sistim pembagian berkala untuk memakainja. Keadaan seperti ini timbul karena desakan penduduk, jang djumlahnja tidak setimbang dengan persediaan tanah. Lambat-laun sistim itu bakal lenjap, dilonda oleh arus sosial dalam sedjarah.

Berdasarkan milik bersama atas tanah, tanah sebagai alat produksi jang terutama dalam masjarakat agraria, maka orang-seorang dalam mempergunakan tenaga ekonominja selalu merasa terikat kepada persetudjuan orang banjak sedesa.

Semangat kolektif itu ternjata pula pada melaksanakan pekerdjaan jang berat-berat, jang tidak terpikul oleh orang-seorang, seperti menggarap

sawah, memotong padi, membuat rumah, mengantar majat kekubur, membuat pengairan dan banjak lainnja. Semua pekerdjaan itu dilakukan bersama-sama setjara gotong-rojong. Bukan sadja usaha jang mengenai kepentingan umum, seperti membuat djalan dan menggali saluran pengairan, dikerdjakan bersama-sama, tetapi djuga pekerdjaan jang mengenai kepentingan prive dilakukan bersama atas semangat tolong-menolong. Sistim upahan tak orang kenal dalam masjarakat desa jang asli. Tidak sadja berat sama dipikul, ringan sama didjindjing, tetapi djuga sedih sama diderita dan gembira sama dirasa. Selamatan jang sering diadakan didesa dengan berganti tempat adalah pula suatu manifestasi dari pada semangat kolektif tadi. Maka dengan semangat tolong-menolong itu tertanamlah didalam masjarakat desa jang asli dasar kooperasi sosial, jang dapat didjadikan landasan untuk membangun kooperasi ekonomi, sebagai sendi perekonomian masjarakat.

Dalam masjarakat Indonesia jang asli tidak ada perpisahan jang tegas antara apa jang dikatakan hukum publik dan hukum prive, seperti jang lazim dibuat dalam masjarakat Barat jang berdasarkan individualisme. *Van Vollenhoven* menegaskan dalam bukunja tentang hukum adat Indonesia, bahwa hukum adat hanja dapat dipahamkan, apabila orang selalu memperhatikan sifat perkauman (commune trek) jang kuat dalam pergaulan hidup di Djawa dan Madura [19]. Sifat perkauman itu pada hukum tidak

19. *C. van Vollenhoven,* „Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië I", Leiden 1917, hal. 541. Lihat djuga hal. 641.

sadja terletak dalam hak jang aneh jang diperoleh pemerintah desa atas dasar hak ulajat desa, seperti tjampur tangan dalam hal mendjual dan menggadaikan tanah, hak untuk meminta penjerahan tanah selama waktu jang tidak ditentukan guna kepentingan desa, memberikan tanah jang tidak dikerdjakan kepada orang-orang baru. Sifat perkauman itu adalah pula karena segala hukum harus dipahamkan dari djurusan, bahwa bukan hak individu, seperti pada hukum Roma, jang berlaku, melainkan kepentingan pergaulan hidup bersama menguasai pemakaian barang kepunjaan sendiri.

Sifat perkauman itu tidak sadja terdapat pada hukum adat di Djawa dan Madura, tetapi djuga diseluruh Indonesia. Ini dinjatakan dengan bukti-bukti oleh *Holleman* dalam uraiannja tentang „tjorak komunal pada penghidupan hukum Indonesia"[20], berdasarkan penjelidikan berbagai ahli pada beberapa daerah di Indonesia.

Dalam pidato-inauguralnja tentang hubungan individu dan masjarakat dalam hukum adat, *Soepomo* menerangkan bahwa „bukan orang-seorang melainkan orang-masjarakat jang terutama dalam hukum adat. Pada pusat penghidupan hukum terletak masjarakat. Orang-seorang terutama dipandang sebagai anggauta masjarakat, sebagai alat jang hidup untuk melaksanakan tudjuan masjarakat. Menurut dunia hukum adat hidup orang-seorang adalah hidup jang tudjuannja melakukan djasa kepada masjarakat.

20. Mr *F.D. Holleman,* „De commune trek in het Indonesisch Rechtsleven", Leiden, 1935.

Djasa jang harus dilakukan untuk masjarakat tidak terutama dirasakan oleh orang-seorang sebagai beban jang ditimpakan kepadanja oleh salah satu kekuasaan diluar dia. Sifatnja bukanlah „kurban", jang harus diberikan orang untuk kepentingan bersama. Menurut keinsafan rakjat tugas-tugas kemasjarakatan itu adalah djabatan jang biasa dan sepatutnja dalam penghidupan. Sebaliknja orang-seorang sebagai anggota masjarakat adalah pula pemangku hak. Menurut djalan pikiran orang Indonesia hak-hak itu adalah hak masjarakat, jaitu kekuasaan jang diserahkan kepada orang-seorang berdasarkan fungsinja dalam masjarakat. Dari orang-seorang diharapkan, bahwa ia melakukan haknja sepadan dengan tudjuan sosial hukum itu .... Hubungan antara orang-seorang dan masjarakat dalam penghidupan desa dikuasai oleh keinsafan bersekutu pada orang-seorang dan oleh rasa seia-sekata antara individu dan golongan sebagai kesatuan".[21]

Proses individualisasi jang digerakkan oleh ekonomi moderen menarik djuga masjarakat Indonesia berangsur-angsur kedalam arusnja. Tetapi proses individualisasi itu, jang memperbendakan segala hubungan manusia, tidak dapat melenjapkan sifat perkauman itu dalam hukum adat Indonesia. Djuga dalam desa jang paling madju tjita-tjita perkauman itu hidup terus. Baik Holleman maupun Soepomo memperoleh kesan demikian.

Hukum adat jang tidak tertulis adalah tjermin dari

21. Mr *Raden Soepomo,* „De verhouding van individu en gemeenschap in het adatrecht", 1941, hal. 8.

pada organisasi masjarakat jang sebenarnja. Dari perubahan-perubahan jang terdapat pada hukum adat dari masa ke masa dapat pula diketahui perubahan dalam penghidupan masjarakat. Ada timbul adat jang diadatkan. Tetapi sampai begitu djauh semangat kolektivisme masih hidup dalam masjarakat Indonesia.

Proses individualisasi akan berdjalan terus sebagai antitesa terhadap kolektivisme dalam masjarakat jang asli. Tetapi tjita-tjita sosialisme Indonesia mau mempertahankan djiwa kolektif itu sebagai sendi bangunannja. Djalan kesitu ialah membelokkan individualisme jang mulai berkembang itu dengan organisasi dan pendidikan sosial. Bukan kembali kepada kolektivisme jang tua masjarakat diadjak, melainkan mendudukkan tjita-tjita kolektivisme itu pada tingkat jang lebih tinggi dan moderen, jang lebih efektif dari individualisme.[22] Individualisme jang mulai berkembang dengan menghidupkan kapitalisme nasional akan disaingi dan dihantjurkan oleh kapitalisme asing jang sangat kuat dan berkuasa. Mana jang dapat dipakainja sebagai budjangnja dan kaki tangannja ditampungnja dan didjadikannja ulasan tjakarnja kedalam masjarakat Indonesia. Sebab itu semangat individualisme Indonesia jang baru muntjul itu dapat ditampung didalam suatu organisasi jang berdasarkan usaha bersama untuk kepentingan hidup bersama. Organisasi itu ada akar-

22. Lihat karangan saja „Colectivisme tua dan baru" dalam Daulat Rakjat no 75, tanggal 10 Oktober 1933, dimuat kembali dalam „Kumpulan Karangan" saja, djilid I, hal. 90 d.s.

nja dalam masjarakat jang asli, dimana individualisme muda itu tidak dapat hidup lagi, merasa terbelenggu.[23] Diatas dasar kooperasi sosial jang lama dibangun *kooperasi ekonomi,* dimana ada kebebasan bagi individu untuk mengambil inisiatif atas persetudjuan bersama bagi keperluan bersama. Kooperasi dasarnja usaha-bersama untuk membela kepentingan bersama, berdasarkan self-help, tolong diri-sendiri. Kooperasi sematjam ini menghidupkan djiwa kolektif jang dinamis, sedangkan kepribadian manusia tidak tertindas. Seperti kata *Lavergne,* tjita-tjita kooperasi berhasil menjatukan kepentingan seseorang dengan kepentingan bersama.[24]

Demikianlah timbul tjita-tjita untuk menjusun sosialisme Indonesia dari bawah, dengan bersendikan bangunan-bangunan kooperasi, jang akan meliputi seluruh bidang ekonomi : konsumsi, produksi, distribusi dan kredit. Indonesia dibajangkan sebagai suatu persemakmuran kooperasi, dalam perhubungan kerdja-sama dengan menjingkirkan segala persaingan. Tiap-tiap organisasi masjarakat, besar dan ketjil, dapat berbentuk kooperasi, seperti perusahaan, desa pertanian, desa nelajan ditepi laut, desa pertukangan, kampung-kampung konsumen dikota dan banjak lainnja. Kalau memang mungkin dilaksanakan didalam

23. Lihat a.l. Mr *F.D. Holleman,* „De commune trek in het Indonesisch Rechtsleven", hal. 11 d.s.
24. *Bernard Lavergne,* „La Révolution Coopérative", Paris 1949, pag. 368.
Kesimpulan tentang kooperasi Indonesia, lihat pra-saran saja pada Seminar Kooperasi di Jogjakarta, tanggal 27-29 Desember 1958, tentang „Pendidikan Menengah Kooperasi" (Diterbitkan oleh Jajasan Pendidikan Kooperasi, Jogjakarta), hal. 9.

praktik apa jang dikatakan Marx dalam teori, bahwa dalam sosialisme negara akan lenjap sebagai organisasi penguasa dan digantikan oleh organisasi pengurus masjarakat untuk membagi-bagikan kepada orang banjak barang-barang jang dihasilkan bersama-sama, maka sekurang-kurangnja tjita-tjita ini dapat dilaksanakan pada pemerintahan rakjat jang terbawah. Pemerintah desa sebadan dengan pengurus kooperasi desa. Desa dan kooperasi mendjadi identik

Djalan ke tjita-tjita itu sedikit dipermudah oleh gerak seiring dari jang bertentangan. Kapitalisme kolonial, jang tidak memberi kesempatan berkembang kepada kapitalisme muda Indonesia, membuka djalan hidup bagi lawannja : kooperasi Indonesia. Kooperasi Indonesia jang akan mendjadi sendi bagi sosialisme Indonesia. Djuga sosialisme Indonesia menudju terlaksananja pergaulan hidup di Indonesia, dimana tak ada penindasan dan penghisapan dan terdjaminnja bagi rakjat, bagi tiap-tiap orang, kemakmuran dan kepastian penghidupan serta perkembangan keperibadiannja.

Sungguhpun ditindas oleh reaksi kolonial dan fasisme, tjita-tjita itu terus menjala dalam dada orang Indonesia jang berdjuang seperti api makan sekam. Setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannja, tjita-tjita itu hidup kembali dalam Undang-Undang Dasar 1945, tertanam didalam tiga pasal.

Pasal 33

Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Tjabang-tjabang produksi jang penting bagi negara dan jang menguasai hadjat hidup orang banjak dikuasai oleh negara.

Bumi dan air dan kekajaan alam jang terkandung didalamnja dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnja kemakmuran rakjat.

Pasal 27 ajat 2

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerdjaan dan penghidupan jang lajak bagi kemanusiaan.

Pasal 34

Fakir-miskin dan anak-anak jang terlantar dipelihara oleh negara.

Dengan ketentuan-ketentuan ini dalam Undang-Undang Dasar, maka terdapatlah pegangan untuk merealisasikan apa jang dahulu dikandung sebagai tjita-tjita. Apabila didjalankan sungguh-sungguh, tudjuan sosialisme jang terdekat akan tertjapai, jaitu rakjat Indonesia terlepas dari kesengsaraan hidup dan tiap-tiap orang terdjamin penghidupannja.

Usaha bersama atas asas kekeluargaan ialah kooperasi, seperti jang dipahamkan dalam sosialisme Indonesia. Pasal 33 U.U.D. membagi pekerdjaan membangun ekonomi masjarakat antara kooperasi dan negara. Kooperasi membangun dari bawah, mengadjak orang banjak bekerdja sama untuk menjusun dasar-dasar kemakmuran rakjat. Usaha jang besar-besar diselenggarakan oleh negara. Dikuasai oleh negara tidak berarti, bahwa pemerintah sendiri

mendjadi pengusaha dengan segala birokrasi jang ada padanja. Pemerintah menetapkan politik perekonomian, berdasarkan keputusan Madjelis Permusjawaratan Rakjat atau dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat. Pekerdjaan dapat diserahkan kepada badan-badan pelaksana jang bertanggung djawab kepada pemerintah, jang kerdjanja dikontrole oleh negara. Dalam masa peralihan badan-badan itu boleh djadi perusahaan-perusahaan negara jang berbentuk badan hukum atau perusahaan-perusahaan partikulir jang berbentuk perseroan terbatas. Siapa jang lebih tepat mengerdjakan, bergantung kepada tenaga jang ada dan struktur masjarakat jang sedang berkembang. Sosialisme menghendaki pekerdjaan jang efisien, jang tepat menurut tudjuannja.[25] Seperti kata *Engels :* anarki sosial dari pada produksi, seperti didalam kapitalisme, berganti dalam sosialisme mendjadi suatu peraturan sosial dari pada produksi menurut suatu rentjana jang tertentu, sesuai dengan keperluan masjarakat dan tiap-tiap orang.[26] Tiap-tiap warga-negara berhak atas pekerdjaan dan atas penghidupan jang lajak bagi kemanusiaan. Negara mesti mempunjai rentjana jang teratur untuk menemui tuntutan jang asasi ini. Disebelah itu negara berkewadjiban memelihara fakir-miskin dan anak-anak jang terlantar. Itu tak lain dari pada pelaksanaan keadilan sosial. Dalam sosialisme tak ada kemiskinan hidup.

[25] Lihat buku saja „Ekonomi Terpimpin", hal. 31.
[26] *Friedrich Engels.* „Anti-Dühring", hal. 346 (Edisi Inggeris, hal. 387).

masjarakat sosialis. Bekerdja dalam sistim sosialis dalam hubungan jang harmoni, dimana kepribadian manusia tidak tertindas, memupuk manusia djadi sosialis.

Djadinja, bukan orang sosialis harus ada lebih dahulu untuk menjelenggarakan sosialisme, melainkan sosialismelah jang menghidupkan orang sosialis. Sebab itu merintis djalan ke sosialisme dapat dikerdjakan, asal ada tjita-tjitanja dan pendukung-pendukung inti jang berkemauan untuk mendjadi pelopornja dan pembimbingnja. Tiap-tiap pembangunan jang berdasarkan tjita-tjita besar dimulai oleh suatu golongan ketjil jang aktif, orang banjak menurut dibelakang.

Oleh karena tudjuan sosialisme jang terdekat ialah melepaskan rakjat dari kesengsaraan hidup dan memberikan djaminan hidup bagi tiap-tiap orang, maka soal ekonomi jang pertama bagi sosialisme ialah menentukan dan memperoleh barang-barang keperluan hidup jang terpenting bagi rakjat Indonesia. Dengan pandangan rata sadja dapat diketahui, bahwa keperluan hidup rakjat jang terutama itu ialah makanan, pakaian, perumahan, kesehatan dan pendidikan anak-anak. Urutan itu kira-kira sama bagi segala bangsa, tetapi intensita satu-satunja berlain-lain. Bagi rakjat Indonesia jang terbanjak, jang masih hidup dalam lembah kemelaratan, urutan keperluan dan intensitanja sedjalan. Dari statistik serta penilikan dari seluruh daerah dapat diketahui, berapa besarnja kekurangan pada tiap-tiap bidang jang harus dipenuhi untuk mentjapai dasar minimum

sementara bagi penghidupan. Sementara, karena dasar minimum itu masih djauh dibawah taraf kemakmuran jang ditjiptakan bagi seseorang dalam politik perekonomian sosialis.

Dalam perhitungan itu tidak boleh dilupakan keadaan penduduk jang terus bertambah. Tiap-tiap tahun ada tambahan mulut jang minta makan, ada tangan baru jang, minta pekerdjaan, diulurkan oleh pemuda-pemuda jang mulai dewasa. Semuanja ini mengubah struktur kepentingan rakjat jang terpenting. Perhitungan tentang itu harus disiapkan saban tahun oleh Biro Perantjang sebagai alat teknik dari pada Dewan Perantjang, dengan bekerdja sama dengan Biro Statistik. Selain dari itu ada keperluan hidup tingkat kedua, penggenapi keperluan hidup jang terpenting tadi, seperti tambahan pakaian, perhiasan rumah dan lain-lain. Sesudah itu ada lagi keperluan hidup tingkat ketiga, keempat dan seterusnja, jang termasuk barang-barang luxe. Barang-barang ini adalah barang-barang jang tidak mendesak, tetapi menambahkan tjahaja kepada penghidupan. Dalam kapitalisme — sebelum beralih ke „welfare state" — barang-barang itu mendjadi keperluan orang-orang kaja sadja jang sedikit djumlahnja dibandingkan dengan djumlah rakjat djelata. Tetapi didalam sosialisme barang-barang itu — ketjuali jang super de luxe — mendjadi keperluan rakjat jang banjak, jang masuk kedalam lingkungan hidupnja selangkah demi selangkah, sedjalan dengan perkembangan kemakmuran. Bagi keperluan masjarakat Indonesia sekarang, barang-barang itu terletak

diluar priorita. Priorita dalam masa pertama ialah memperoleh keperluan hidup jang terpenting bagi rakjat jang banjak, dengan sebaik-baiknja.

Hanja sebagian dari keperluan hidup jang terpenting itu dapat dihasilkan didalam negeri. Sebagian lagi harus didatangkan dari luar negeri, di-impor. Karena itu impor mendjadi pelengkap produksi dalam negeri. Pelengkap jang tidak boleh tidak mesti ada, kalau benar-benar politik perekonomian kita menudju kemakmuran rakjat. Sebab itu pula politik perekonomian sosialis jang didasarkan kepada memenuhi keperluan hidup rakjat — Bedarfdecking — meletakkan impor dimuka. Expor menjusul dibelakang. Tetapi antara impor dan expor ada hubungan jang seimbang, sebab expor gunanja pembajar impor. Makin banjak dilakukan impor untuk keperluan dalam negeri, makin besar pula diperbuat expor. Oleh karena itu pula, tjabang-tjabang produksi untuk expor, seperti penghasilan pertanian, industri dan keradjinan, harus mendapat perhatian istimewa dan pemeliharaan sungguh-sungguh. Mutunja harus bertambah baik, sebab bukan kita melainkan pembeli luar negeri jang menentukan nilainja dan harganja. Kita tidak pula sendiri sebagai sipendjual dipasar dunia, melainkan ada banjak negeri konkuren.

Tanah air kita jang luas alamnja dan subur tanahnja memberi kesempatan untuk mentjapai selt-supporting dalam berbagai-bagai hal dalam waktu jang tidak terlalu lama. Sekurang-kurangnja dalam hal bahan makanan dan bahan perumahan jang

terpenting. [27] Kesempatan ini harus dipergunakan sebaik-baiknja dan selekas-lekasnja. Dalam rangka itu pula harus dipahamkan politik transmigrasi Indonesia. [28] Tudjuannja membuka ruang hidup baru didaerah jang kosong dan meluaskan ruang hidup didaerah jang padat jang ditinggalkan oleh rakjat jang pindah tempat. Tambahan kemakmuran djadi berlipat ganda. Ini bukan politik autarki, melainkan tuntutan rasionalisme ekonomi jang seluruhnja sepadan dengan sosialisme. Djuga sosialisme memelihara prinsip ekonomi, jaitu mentjapai hasil jang sebesar-besarnja dengan alat jang ada. Untuk biaja transmigrasi itu, jang akan menimbulkan tambahan kemakmuran jang lipat-ganda achirnja dari biajanja, negara dapat memindjam dengan djangka lama. Devisen jang selama itu terpakai untuk membeli beras, kalau sudah self-supporting dapat dihemat dan dipergunakan untuk pembajar mesin-mesin jang dibeli guna pembangunan dalam berbagai bidang.

Politik perekonomian sosialis, jang berdasarkan rentjana, dapat mendjalankan apa jang disebut sistim intertabuler. Ada imbangan selalu antara impor keperluan hidup jang terpenting dengan barang-barang pembajarnja dari expor. Dari semulanja ditentukan, berapa djumlah tiap-tiap barang

27. Lihat karangan saja „Pers Indonesia dan Pembangunan Ekonomi" — dalam Kumpulan Karangan saja, bagian ke-IV, hal. 236. Lihat djuga Prasaran saja pada Munap „Kita membangun", dimuat djuga didalam buku saja „Beberapa Fasal Ekonomi I", tjetakan ke-6, 1960, hal. 270.

28. Lihat „Industri dan Transmigrasi dalam Indonesia" — dalam „Beberapa Fasal Ekonomi I", hal. 162.

keperluan rakjat jang terpenting itu di-impor dan hasil barang-barang expor mana jang akan dibajarkan untuk tiap-tiap bagian impor itu. Dengan begitu tidak akan terdjadi lagi keadaan jang sering kita alami, bahwa djabatan-djabatan jang bersangkutan pada pemerintah bingung dan kalam kabut mentjari devisen untuk membajar beras jang akan di-impor.

Jang diutamakan pula dalam ekonomi sosialis ialah persediaan air, listerik, gas atau bahan bakar lainnja bagi rakjat jang tjukup dan murah harganja. Barang-barang ini termasuk keperluan hidup rakjat jang terpenting. Rakjat tidak dapat dikatakan bahagia — djangankan makmur — kalau menderita kekurangan dalam hal itu. Air tidak tjukup kalau hanja untuk masak dan minum sadja, rakjat perlu mandi untuk segar badannja serta membarui tenaganja. Sebelum tiap-tiap rumah rakjat mempunjai kamar mandi, tempat-tempat mandi umum jang tjukup banjak djumlahnja mesti diadakan. Ini tugas pertama bagi Kotapradja dan pemerintahan tingkat bawahan lainnja jang berotonomi. Sebagai bangsa jang merdeka kita merasa malu, bahwa di ibu-kota Republik rakjat masih mandi dikali jang kotor airnja. Apakah ini bukan suatu pengaduan kepada kita sendiri? Keadaan jang melanggar martabat manusia ini sudah dua belas tahun terletak dalam rentjana untuk dihilangkan. Tetapi sampai sekarang kini belum ada perubahan. Sungguhpun masalah ini sosial sifatnja, pada hakekatnja sangat erat hubungannja dengan masalah ekonomi.

Suatu politik djangka pendek dan djangka pandjang tentang perumahan rakjat harus diadakan diseluruh Indonesia untuk memberikan wadjah jang baru kepada masjarakat kita. Tiap-tiap tahun harus dibangun rumah-rumah baru untuk menampung rakjat jang bertambah, sampai semua keluarga memperoleh tempat kediaman sendiri. Gubuk-gubuk jang lebih merupakan kandang sapi dari tempat kediaman manusia harus berangsur-angsur lenjap. Keadaan orang jang masih diam dibawah djembatan adalah satu tamparan kepada peradaban. Negeri jang mau mendjadi negeri sosialis tidak dapat mempertanggung-djawabkan keadaan jang seperti itu.

Politik perumahan sosialis berdasar kepada sjarat jang tertentu, untuk memperkembangkan kepribadian manusia. Rumah rakjat, betapa djuga sederhananja, harus memberikan hidup jang bertjahaja kepada penghuninja. Hanja dalam suasana itu kepribadian manusia dapat berkembang. Ini harus diperhatikan dari semulanja, kalau orang benar-benar hendak menjelenggarakan sosialisme di Indonesia. Membuat rumah asal ada sadja, tidak sesuai dengan tuntutan itu.

Tetapi masalah perumahan ini berat sekali segi ekonominja. Kalau kita perhatikan, bahwa penduduk Indonesia bertambah satu setengah djuta setahun, jang tersusun barangkali dalam 300.000 keluarga baru, maka tidak sedikit rumah baru penampung mereka harus disediakan tiap-tiap tahun dalam djumlah jang berkenaikan. Belum lagi rumah-rumah pengganti jang usang dan buruk seperti disebut tadi.

Didesa-desa masalah ini dapat diatasi dengan djalan gotong-rojong menurut adat jang lama. Tetapi diluar daerah desa, dimana sistim upah dan sewa sudah mendjadi kebiasaan, masalahnja sukar dipetjah. Orang-orang partikulir jang beruang tak sanggup membuat rumah sewaan, karena dalam sistim harga sekarang tidak ada perimbangan. Upah, harga dan sewa tidak berpadanan. Rumah jang ongkos membuatnja kira-kira Rp 100.000,— harus nanti disewakan kepada seorang pekerdja jang hanja sanggup membajar sewa rumah misalnja Rp 25,— sebulan. Dalam berapa ratus tahun baru kembali uangnja? Dan rumahnja sudah hantjur lebih dahulu.

Oleh karena itu pemetjahan masalah harga, jang bersangkut-paut kedalam dan keluar negeri, dalam interdepensi harga barang dan nilai uang, adalah suatu hal jang sangat mendesak. Rentjana ekonomi sosialis tidak dapat berdjalan dalam sistim harga jang tidak berimbang seperti sekarang ini.

Soal jang rapat pula hubungan dengan masalah jang diperbintjangkan diatas ialah soal memperbesar *tenaga-beli* rakjat. Rakjat tidak terlepas dari kesengsaraan hidup, apabila tenaga-belinja jang riil tidak bertambah sampai beberapa kali lipat dari jang sekarang. Dan perkembangan ekonomi akan tetap tertahan, kalau rakjat tetap miskin. Sebab itu rentjana pembangunan harus didasarkan atas kenaikan tenaga-beli jang meningkat. Perkiraan, bahwa pendapatan rakjat jang riil harus bertambah 15% tiap-tiap kali 5 tahun, tidaklah begitu salah. Apakah ini dapat dilaksanakan terus-menerus adalah soal

masa datang jang masih djauh. Masalah ini erat hubungannja dengan tudjuan memperbesar pendapatan nasional dalam rangka pembangunan. Tetapi beberapa kali kenaikan seperti itu wadjib diselenggarakan untuk mentjapai tingkat kemakmuran jang baru sedikit terletak diatas baris minimum. Sampai sekarang kita mengalami jang sebaliknja. Tenaga-beli rakjat berkurang terus, bertentangan dengan tjita-tjita mentjapai Indonesia jang adil dan makmur. Sebab itu masalah ini adalah masalah jang sangat penting bagi ekonomi sosialis Indonesia.

Soal memperbesar tenaga-beli rakjat hanja dapat dipetjah dalam rangka memperluas sumber penghidupan. Dengan ini sampailah kita kepada masalah *produksi,* jang mendjadi soal pokok bagi sosialisme.

Produksi harus lantjar djalannja, tidak tertegun-tegun, tidak pula dikatjau oleh kelebihan dan kekurangan jang silih berganti datangnja. Produksi sosialis harus bebas dari pukulan kondjungtur, jang mengakibatkan pemborosan, seperti berlaku dalam kapitalisme. Sosialisme menudju produksi jang berkembang rata, dimana selalu ada persesuaian antara produksi dan konsumsi. Untuk mentjapainja harus ada rentjana jang ditetapkan terlebih dahulu, berdasarkan penilikan jang teliti tentang kedudukan dan perkembangan fakta-fakta ekonomi jang njata.

Bahwa produksi harus diperbesar untuk menampung tenaga jang tidak dan belum bekerdja, untuk memperbesar kemakmuran, adalah pendapat umum dalam ekonomi. Sedjak kira-kira seperempat abad jang lalu pokok persoalan ekonomi berputar sekitar

masalah full-employment. Demikian djuga lambat-laun berdekatan pendapat, bahwa organisasi produksi harus didasarkan kepada prinsip menghasilkan barang dengan ongkos jang sedikit-dikitnja, sedangkan tiap-tiap faktor produksi memperoleh pembagian pendapatan jang tepat dan adil dari pada produksi sosial jang dihasilkan bersama-sama. [29] Tetapi dalam praktik terdapat pertentangan antara buruh dan madjikan tentang menentukan upah jang adil. Upah jang mendjadi pendapatan bagi kaum buruh adalah ongkos produksi bagi madjikan. Mentjari persesuaian dalam hal itu, supaja benar-benar terlaksana pembagian pendapatan jang adil adalah tugas sosialisme.

Perbedaan jang prinsipiil antara kapitalisme, jang melakukan produksi atas dasar keuntungan, dan sosialisme, jang berpedoman dengan „Bedarfdeckungsprinzip" — dasar memenuhi keperluan hidup — mengenai soal milik atas alat-alat penghasil. Menurut kapitalisme alat-alat penghasil harus milik partikulir, supaja tanggung djawab dalam perekonomian dirasakan sepenuh-penuhnja. Menurut sosialisme, alat penghasil ditangan suatu kelas selalu dipergunakan sebagai alat penindas dan pemeras. Sebab itu alat penghasil pada asasnja harus ditangan masjarakat, jang diwakili oleh negara.

Menurut keadaan di Indonesia sekarang, alat-alat penghasil berada ditangan tiga golongan : pemerintah, kooperasi dan kaum usawan partikulir. Apakah

29. Lihat seterusnja karangan saja tentang „Organisasi produksi" dalam „Beberapa Fasal Ekonomi I", tjetakan ke-6, 1960, hal. 94 d.s.

alat-alat penghasil ditangan kaum partikulir itu harus disosialisasi ?

Ada jang berpendapat begitu sedjak Manipol mendjadi haluan politik negara. Kegiatan untuk menasionalisasi berbagai perusahaan besar sekali. Aktivita ekonomi diserahkan kepada kaum partikulir dan perseroan-perseroan terbatas negara (PTN). Tetapi pengalaman menjatakan, bahwa tindakan itu hampir rata-rata mengalami kegagalan. Karena itu kuat lagi suara jang mengatakan, supaja semua aktivita ekonomi diserahkan kepada kaum partikulir dan pemerintah membatasi diri dengan membuat peraturan serta melakukan pengawasan sadja.

Bagaimana duduknja masalah ini? Dimana terletak kesalahan? Kesalahan terletak pada dua bidang : pada memahamkan teori dan pada menilai perkembangan masjarakat.

Tentang memahamkan teori, ada baiknja diperhatikan benar-benar apa jang dikemukakan oleh bapa sosialisme ilmiah, Karl Marx. Marx dan Engels menulis dalam Manifes Komunis, bahwa „keistimewaan dari pada komunisme bukanlah melenjapkan hak-milik umumnja, melainkan menghapuskan hak-milik burdjuis". Hak-milik itu dalam sedjarah selalu berpindah tangan. Revolusi Perantjis menghapuskan hak-milik feodal dan menggantinja dengan hak-milik burdjuis. Dalam perkembangan kapitalisme hak-milik jang ketjil-ketjil hantjur berturut-turut dan terdjadilah akumulasi dan konsentrasi kapital besar-besar ditangan segolongan ketjil. Dan hak-milik jang penghabisan inilah jang mesti disosialisasi dalam

revolusi sosial. Itulah gunanja dalam pandangan Marx diktatur proletariat sementara. Tentang proses penghapusan hak-milik besar ditangan jang sedikit tadi Marx menulis dalam „Das Kapital" seperti berikut : [30]

„Tjara perampasan harta kapitalis jang timbul dari produksi kapitalis, karena itu terbentuk milik prive kapitalis, adalah negasi (peniadaan) jang pertama dari pada milik perseorangan jang diperoleh dengan djerih-pajah sendiri. Tetapi produksi kapitalis menimbulkan dengan tidak boleh tidak suatu proses jang semestinja (Naturprocesses) jang menegasi — meniadakan — dia sendiri. Itu adalah negasi dari pada negasi. Ini tidak mengembalikan milik prive jang hilang, melainkan melahirkan milik prive atas dasar penghasilan jang ditjapai dalam masa kapitalisme, jaitu kooperasi dan milik bersama atas bumi dan atas alat-alat penghasil jang diperbuat oleh kerdja itu sendiri.

„Perubahan milik perseorangan jang diperoleh dengan kerdja sendiri dan berada dalam keadaan terpetjah-petjah mendjadi milik kapitalis adalah suatu proses jang semestinja, jang memakan waktu jang lama sekali, djauh lebih berat dan sukar dari pada mengubah perusahaan-perusahaan besar jang sudah ada berdasarkan hak-milik kapitalis mendjadi milik masjarakat. Jang dahulu soalnja merampas harta rakjat jang banjak oleh perampok (Usurpatoren) jang sedikit djumlahnja; jang sekarang

30. *Karl Mark,* „Das Kapital I", hal. 728 d.s.

soalnja merebut milik siperampok tadi oleh rakjat jang banjak".

Seperti dikatakan Marx sebelum itu : adjal hak-milik kapitalis sampailah. Siperampok kena rampas.

Dari kutipan ini njatalah, bahwa pemindahan alat-alat produksi ketangan masjarakat baru berlaku sesudah tertjapai konsentrasi dan monopoli orang sedikit atas itu. Sebelum itu perampasan alat-alat penghasil dilakukan oleh kaum kapitalis besar atas kapitalis ketjil-ketjil. Djadinja bukan tugas sosialisme untuk melutjuti kapitalis ketjil-ketjil itu dari alatnja. Demikian djuga kira-kira pendapat seorang sosialis jang mendapat penghargaan baik di Barat maupun dinegeri-negeri komunis, *Oskar Lange,* dalam bukunja „On the Economic Theory of Socialism". [31]

Dalam masa peralihan — katanja — suatu pemerintah sosialis harus memperbuat suatu program sosialis jang tepat dan mendjalankannja dengan tegas. Disebelah itu sebagai komplemen — penggenapkan — dari pada politik sosialisasi jang tjepat, pemerintah sosialis harus menjatakan dengan tegas, bahwa segala harta dan perusahaan — ketjuali jang sudah disosialisasi — tetap ditangan orang-orang partikulir dan akan didjamin keselamatannja. Pemerintah mesti menerangkan sampai djelas bagi tiap orang, bahwa sosialisme tidak ditudjukan kepada milik perseorangan umumnja, melainkan hanja terhadap satu bentuk spesial dari pada milik per-

31. Lihat : „On the Economic Theory of Socialism", by *Oskar Lange and Fred Taylor,* ed. by Benjamin Lippencott 4th printing, The University Press Minnesota, 1956, hal. 124 d.s.

seorangan, jang menimbulkan kedudukan sosial istimewa dengan merugikan rakjat jang terbanjak atau menimbulkan alangan bagi kemadjuan ekonomi. Segala milik perseorangan atas alat-alat penghasil jang melakukan fungsi sosial jang berguna akan mendapat perlindungan penuh dan bantuan dari negara sosialis. Untuk menghilangkan rasa tjuriga dan takut pada pengusaha-pengusaha partikulir, pemerintah sosialis hendaklah memperlihatkan kebenaran maksudnja dengan bukti jang njata terhadap kaum pengusaha dan pemegang saham jang ketjil-ketjil.

Sekian Oskar Lange. Pendapat ini kira-kira sedjalan dengan pendirian jang diambil oleh sosialisme Indonesia dalam teori. Jang dikuasai negara hanja tjabang-tjabang produksi jang penting jang menguasai hadjat hidup orang banjak. Kemudian negara berkewadjiban untuk mengexploitasi kekajaan alam Indonesia dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakjat. Bagi orang-orang partikulir ada kesempatan untuk mengerdjakan produksi jang tidak menguasai hadjat hidup orang banjak, asal dilakukan dengan tidak ada penindasan dan penghisapan atas kaum buruh.

Tadi disebut, bahwa kesalahan jang kedua dari mereka jang mengandjurkan sosialisasi alat-alat penghasil jang masih ditangan partikulir ialah salah menilai perkembangan masjarakat. Proses dan kenjataan dalam masjarakat, jang digambarkan oleh Marx, belum ada di Indonesia waktu kita melangkah ke sosialisme demi memproklamasikan kemerdekaan kita. Kapital kolonial jang berkuasa dahulu banjak

jang hantjur. Sisanja dapat dikuasai dan dikontrole oleh pemerintah. Ada kapital monopoli pada tambang dan produksi minjak, berdasarkan konsesi djangka lama, tetapi pemerintah dapat menguasainja. Ini bukan kapitalisme monopoli jang menguasai seluruh ekonomi seperti jang dimaksud oleh Marx. Alat-alat penghasil lainnja, jang terbilang ketjil dan sedang, berada ditangan beribu-ribu pengusaha. Kaum kapitalis Indonesia jang beribu-ribu itu, jang timbul dengan proses individualisasi jang disebut diatas, masih hidup dalam alam kapitalisme muda, seperti jang didapati di Eropah pada abad ke-17 dan ke-18. Semangatnja dipengaruhi oleh apa jang disebut *Sombart* [32] „Rentnerideal" — tjita-tjita rentenir jaitu semangat jang mau tjepat kaja dan hidup bersenang-senang dihari tua. Oleh karena itu mereka jang terbanjak orang dagang. Sedikit sekali jang mau menempuh medan industri jang besar risikonja dan lebih sukar kerdjanja. Semangat kapitalisme-raja, jang mendorong orang kemedan industri, baru terdapat dalam golongan penduduk asing bangsa Tionghoa dan warga-negara peranakan Tionghoa. Itupun masih pada permulaan. Untuk sementara waktu, baru golongan inilah jang dapat melahirkan „captain of industry", pertindak jang berani menempuh djalan baru dan sukar, jang harus dihadang dengan sepenuh-penuh tenaga. Usahawan Indonesia asli jang boleh disebut „captain of industry" dapat dihitung pada djari tangan. Kaum buruh jang terla-

32. Lihat tentang teori Sombart buku saja „Pengantar kedjalan Ekonomi Sosiologi", hal. 169 d.s.

tih dalam perdjuangan kelas, jang memperoleh pengalaman bertahun-tahun dalam produksi industri sedikit sekali. Dari mereka belum dapat diharap akan lahir pemimpin industri. Lapisan rakjat jang terbesar masih orang tani, jang semangat hidupnja menanti. Alam mereka masih diliputi oleh suasana kolektivisme.

Dalam struktur ekonomi sematjam itu pemindahan alat-alat penghasil jang berpetjah-petjah itu ketangan pemerintah tidak memberi manfaat sedikit djuga. Tindakan itu akan menimbulkan kekatjauan sadja, mengurangkan produktivita kerdja dan memperbesar birokrasi dalam perusahaan. Mensosialisasikan perusahaan jang ketjil-ketjil dan sedang hanja mentjapai jang sebaliknja dari jang ditudju oleh sosialisme. Tenaga-tenaga ekonomi jang aktip dan produktif terhenti bekerdja, dengan tidak ada gantinja jang efektif. Padahal tudjuan sosialisme ialah memperbesar kemakmuran rakjat selekas-lekasnja serta melenjapkan penindasan dan penghisapan dalam masjarakat.

Dalam struktur perekonomian Indonesia sekarang tudjuan itu dapat ditjapai dengan mengadakan suatu rentjana pembangunan jang riil. Dengan sistim pembagian kerdja dan bidang jang tepat rentjana itu dapat didjalankan oleh segala tenaga ekonomi jang aktif dalam masjarakat, dibawah pengawasan pemerintah. Berhubung dengan kurangnja kapital dan tenaga pemimpin dalam masjarakat, usaha jang besar-besar hanja dapat dilaksanakan oleh pemerintah. Kalau perlu, pemerintah dapat memindjam kapital

jang agak besar djumlahnja dan menjewa management jang pada tempatnja dari luar negeri. Kooperasi — seperti disebut diatas — menjusun pembangunan dari bawah, mengerdjakan usaha jang ketjil-ketjil dan sedang, untuk berangsur-angsur meningkat keatas. Diantara bidang jang dua itu terletak ruang jang dapat diusahakan oleh orang-orang partikulir dengan tenaga dan kapital jang dapat mereka kumpulkan sendiri. Peraturan sosial dan undang-undang perburuhan jang baik dapat mentjegah penindasan dan pemerasan tenaga, dan dapat mendjamin pembagian pendapatan jang adil.

Politik perekonomian sosialis harus menarok perhatian jang besar sekali kepada masalah distribusi. Distribusi adalah sambungan dari pada produksi untuk menjampaikan barang-barang jang dihasilkan kepada sipemakai, rakjat, menurut dasar pembagian jang adil dan harga jang semurah-murahnja. Badan-badan perantaraan jang terlalu banjak tingkatnja antara produksi dan konsumsi memahalkan harga. Badan-badan perantaraan jang kurang djumlahnja dari jang rasionil dikehendaki oleh peredaran ekonomi, baik vertikal maupun horizontal, menimbulkan matjatnja pembagian. Dan pembagian jang matjat mudah menimbulkan korupsi dan nafsu untuk menumpuk barang dan menaikkan harga. Sebab itu perlu ada suatu sistim distribusi jang rasionil, tepat djumlah tingkatnja dan tjukup terpentjar letaknja, sehingga dapat mentjapai para konsumen pada tempatnja masing-masing. Dalam sistim distribusi itu kooperasi sebagai organisasi kaum konsumen harus

memperoleh kedudukan jang tepat. Tidak sadja untuk menjelenggarakan distribusi jang baik, tetapi djuga untuk mengawasi.

Terhadap barang-barang jang kurang selalu dari jang normal diperlukan rakjat harus diadakan peraturan pembagiannja, sehingga semua orang dapat „kebagian". Istimewa terhadap beras pembagian itu harus lantjar djalannja. Distribusi itu mestilah teratur sedemikian rupa, sehingga pemindahan beras hanja berdjalan dari daerah jang berkelebihan, daerah plus, kedaerah jang kekurangan, daerah minus. [33] Pemindahan-pemindahan barang penting itu hendaknja berlaku seminimum-minimumnja. Kalau dengan tjara begitu daerah pedalaman tidak mempunjai kelebihan dari jang diperlukan sendiri, maka beras impor sadja dipergunakan untuk kota-kota dan perusahaan-perusahaan perkebunan, dimana terdapat konsentrasi kaum konsumen jang tidak menghasilkan barang-barang makanannja. Kekurangan jang masih terdapat *sementara* pada daerah pedalaman dipenuhi dengan beras impor.

Suatu masalah jang maha-penting pula bagi ekonomi sosialis Indonesia ialah soal pengangkutan dan perhubungan, terutama didarat dan dilaut. Sungguhpun begitu, perhubungan udara tidak boleh diabaikan, melihat luasnja tanah air kita. Ekonomi perhubungan sama sadja hukumnja dalam sosialisme dan kapitalisme, jaitu mengangkut orang dan barang dengan ongkos jang semurah-murahnja dalam

33. Lihat tentang ini karangan saja „Soal beras" dalam Beberapa Fasal Ekonomi, djilid I tjetakan ke-enam, hal. 179 d.s.

waktu jang sesingkat-singkatnja. Perbedaan hanja terdapat pada tudjuan perusahaannja. Apabila perusahaan pengangkutan kapitalis tudjuannja mentjari keuntungan, perusahaan pengangkutan sosialis tudjuannja memenuhi keperluan rakjat. Alat-alat pengangkutan itu harus sesuai dengan keperluan rakjat bergerak dan kelantjaran peredaran barang-barang, baik barang konsumsi maupun barang kapital.

Alat pengangkutan Indonesia dilaut masih djauh kurang dari jang diperlukan, tetapi ada bertambah berangsur-angsur. Hanja organisasinja dan koordinasinja masih terkebelakang dari tugasnja : melakukan djasa sebaik-baiknja kepada penumpang dan barang dengan ongkos jang semurah-murahnja dalam waktu jang setjepat-tjepatnja serta melalui djarak jang sependek-pendeknja. Djika ada djiwa sosialis jang memimpin dan mengerdjakan, perbaikan dapat ditjapai berangsur-angsur. Keluh-kesah jang terdengar setiap waktu dari pihak penumpang dan pengirim barang menundjukkan, bahwa banjak sekali hal jang tidak beres jang bertentangan sekali dengan semangat sosialisme.

Keadaan pengangkutan darat, terutama pengangkutan dengan kereta api, sangat menjedihkan. Alat-alatnja sudah banjak jang tua dan usang. Alat-alat jang terhitung barupun jang dibeli sesudah pemulihan kedaulatan sudah banjak jang tandas karena terlalu banjak dipakai dan kurang terpelihara. Frekwensi, banjaknja djumlah perdjalanan kereta api, kurang sekali, tidak sepadan dengan keperluan

rakjat akan menumpang kareta api. Akan tetapi frekwensi pemakaian alat-alat bertambah besar, sehingga kurang kesempatan untuk melakukan „service", pemeliharaan. Achirnja proses ketandasan bertambah tjepat. Karena proses ketandasan itu banjak perhubungan kereta api dengan tempat jang ketjil-ketjil dihapuskan. Ini memperbesar lagi kekurangan pengangkutan jang sudah kurang. Disitu kelihatan berkembang suatu proses jang bertentangan dengan tjita-tjita sosialisme.

Proses jang merupai keruntuhan itu harus ditahan setjepat-tjepatnja dan dibalikkan kedjalan pembangunan sistim pengangkutan kereta api jang rasionil. Pembangunan ini jang menghendaki pembaruan alat-alat jang begitu banjak, jang ongkosnja tidak sedikit, tidak dapat dibiajai dengan kapital sendiri. Ini harus dilaksanakan dengan modal pindjaman luar negeri jang berdjangka pandjang, berpuluh tahun lamanja. Pembajarannja kembali harus diperoleh dari biaja pengangkutan jang dipungut dari penumpang dan barang. Dengan administrasi dan organisasi jang efisien tudjuan ini dapat ditjapai. Tetapi itu baru mungkin, apabila struktur harga, upah dan pendapatan sudah normal kembali. Dengan keadaan seperti sekarang, dimana tenaga beli-dan-bajar rakjat djauh sekali dibawah batas minimum, tudjuan itu tidak akan tertjapai. Soal perimbangan tenaga beli rakjat dan ongkos dan harga adalah soal jang maha-penting bagi sosialisme. Betapapun djuga, rehabilitasi pengangkutan kereta api patut diusahakan selekas-lekasnja, sekalipun pada permulaannja dasar „djasa menutup ongkosnja dengan hasilnja" belum dapat dipenuhi. Kalau perlu ditjarikan djaminan lain untuk memperoleh pindjaman luar negeri itu.

Seterusnja pembuatan djalan perhubungan lainnja, seperti djalan raja, tjukup dengan tjabang dan rantingnja, perlu dilaksanakan dengan teratur oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, karena djalan perhubungan adalah urat nadi perekonomian. Sesuai dengan patokan : siapa jang memakai djalan dia ikut serta membajar ongkos pembuatannja, untuk melalui djalan itu dapat dipungut biaja dengan mengadakan „tol" atau dengan djalan lain. Djuga pembuatan djalan-djalan raja itu diongkosi dengan pindjaman luar negeri. Dalam rangka „bantuan internasional kepada negeri-negeri jang sedang menempuh djalan kemadjuan" masalah ini dapat dipetjah.

Sekarang sepatah kata tentang „land reform", perubahan hak-milik tanah. Tiap sosialisme bermula dengan „land reform". Ini tidak mengherankan, karena dizaman feodalisme tanah tidak sadja sumber penghidupan, tetapi djuga sumber kekuasaan. Siapa jang tidak mempunjai tanah, terpaksa menggantungkan hidupnja kepada tuan tanah besar-besar dan achirnja mendjadi budak. Tanah mendjadi alat penindas dan penghisap bagi kelas feodal jang berkuasa. Sebab itu revolusi sosial jang datang kemudian merombak hak-milik besar itu. Tergantung kepada tjorak revolusi, apakah tanah-tanah itu dibagi-bagikan kepada rakjat tani jang tak punja tanah atau didjadikan milik negara seperti jang terdjadi di U.S.S.R.

Indonesia dalam hal ini merupakan suatu keistimewaan. Tanah pada asalnja kepunjaan masjarakat, kepunjaan desa. Hanja proses individualisasi jang berlaku sedjak beberapa puluh tahun menimbulkan hak milik perseorangan atas tanah. Tetapi rata-rata milik perseorangan itu milik ketjil-ketjil. Milik besar atas tanah, jang sampai beratus-ratus hektare hampir tak ada. Apabila sosialisme Indonesia mentjari dasarnja kedalam masjarakat jang asli, maka sistim „land reform" harus sedjalan dengan itu. Pada dasarnja hak pakai diberikan kepada orang jang mengerdjakan sendiri tanah itu dengan keluarganja dan kepada kooperasi. Dalam masa peralihan hak-milik atas tanah diakui, dengan ketentuan bahwa hak-milik mempunjai fungsi sosial.

Land reform di Indonesia, jang didjalankan dengan Undang-Undang no 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agraria, memang didasarkan kepada tjita-tjita sosialisme Indonesia. Hanja keadaan dimasa peralihan tidak diperhatikan. Karena itu pelaksanaannja akan menghadapi berbagai kesukaran, jang tak mudah mengatasinja. Dalam pasal 9 dan 10 disebut a.l. :

„Tiap-tiap warga-negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunjai kesempatan jang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnja, baik bagi diri sendiri maupun keluarganja.

Setiap orang dan badan hukum jang mempunjai sesuatu hak atas tanah pertanian pada asasnja diwadjibkan mengerdjakan atau mengusahakannja

sendiri setjara aktif, dengan mentjegah tjara-tjara pemerasan".

Tentang pelaksanaannja disebut dalam Peraturan Pemerintah no. 224 tahun 1961 pasal 3, bahwa pemilik tanah jang bertempat tinggal diluar ketjamatan tempat tanahnja terletak, dalam djangka 6 bulan wadjib mengalihkan hak atas tanahnja kepada orang lain diketjamatan tempat tanahnja itu terletak atau pindah kesitu. Diketjualikan dari peraturan itu pemilik tanah jang tinggal diketjamatan jang berdekatan, djika djarak tempat kediamannja dari tempat tanahnja masih memungkinkan ia mengerdjakan tanahnja setjara efisien. Djuga pegawai negeri dan pendjabat militer boleh memiliki tanah diluar ketjamatan tempat tinggalnja, dengan ketentuan bahwa milik atas tanah pertanian tidak boleh lebih dari $^2/_5$ dari maximum jang ditentukan untuk daerah jang bersangkutan.

Disini disebut suatu keketjualian bagi pegawai negeri dan pendjabat tentera. Mereka boleh mempunjai tanah jang terbatas luasnja dengan tiada mengerdjakannja sendiri. Tetapi bagaimana terhadap orang pensiunan, bekas pegawai negeri dan bekas pendjabat tentara? Menurut semangat peraturan itu, apabila mereka tidak kembali kedaerah ketjamatan tempat sawahnja terletak, dalam waktu enam bulan mereka harus mendjual tanahnja itu kepada orang lain jang tinggal disitu. Harga menurut ukuran jang ditetapkan dalam peraturan tersebut terlalu rendah (lihat fasal 6). Apalagi dalam waktu jang nilai uang turun terus. Dengan peraturan seperti itu mereka

dirugikan, dengan menguntungkan sipembeli diketjamatan. Tidak mustahil, kalau peraturan itu menambah kemiskinan dikota tempat orang pensiunan dan menimbulkan kapitalis ketjil-ketjil diketjamatan.

Dari dahulu kala sudah mendjadi kebiasaan bagi pegawai negeri untuk menjimpan sebagian dari gadjinja dan melekatkannja kesawah. Mereka berbuat begitu untuk mengadakan persediaan dihari tua. Pensiun jang tidak tjukup untuk hidup seperti biasa digenapi dengan hasil sawah dikampung, jang diseduakan kepada orang lain. Kalau sekarang sawah itu harus didjual, sekaligus ia djadi „kaja", tetapi uang itu tjepat pula habisnja. Apalagi dimasa segala mahal dan nilai uang turun. Apa jang akan mendjadi tambahan kepada pensiun jang djauh dari pada tjukup? Mereka dihari tuanja akan menderita kesengsaraan hidup. Ini bertentangan dengan tudjuan sosialisme.

Dalam sosialisme jang sudah berdjalan, peraturan agraria jang tersebut tidak menimbulkan keberatan apa-apa. Malahan peristimewaan terhadap pegawai dan pendjabat tentera itu tidak pula perlu. Sebab dalam sosialisme penghidupan orang didjamin. Dalam sosialisme tidak ada kemiskinan dan kemelaratan hidup. Tetapi dimasa peralihan ke sosialisme peraturan pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria tersebut menimbulkan kerusakan sosial, sebab itu perlu diperbaiki.

Masih banjak persoalan ekonomi jang mengenai sosialisme Indonesia jang patut dikupas. Tetapi kita disini membatasi diri hingga jang pokok sadja.

Families of exiles in Banda. Standing, from left to right: Mr. Iwa Kusuma Sumantri, Hatta, Dr. Tjipto Mangunkusumo, Donald (Dr. Tjipto's nephew), Mulyadi (a school teacher), Louis (Donald's younger brother), Sjahrir. Adults seated left to right: Mrs. Iwa, Mrs. Tjipto (Tante Mie), Mrs. Mulyadi. Three children of the Iwas and three of the Mulyadis stand among the women.